



Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka)

Helena Adventy Gudipung^{1*}, Konstantinus Pati Sanga², Yoseph Darius Purnama Rangga³
^{1,2,3}Universitas Nusa Nipa, Indonesia

*Korespondensi Penulis: gudipungellen@gmail.com

Abstract. This research aimed to investigate the impact of the Internal Control System and Regional Financial Supervision on the Accuracy of the Financial Reports of the Sikka Regency Regional Government. The research follows an associative approach with a causal relationship form and utilizes a quantitative method. The population and sample for this research include all Regional Apparatus Work Units (SKPD) in Sikka Regency. Data was collected through a questionnaire distributed to each SKPD, with a total of 72 respondents. The data analysis involved multiple linear regression analysis using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). This research showed that the significance value of X1 is 0.004, which is lower than the significance level of 0.05 ($0.004 < 0.05$) with a *t*-value of 2.989. Similarly, the significance value of X2 is 0.000, also lower than the significance level of 0.05 ($0.000 < 0.05$) with a *t*-value of 4.365. Additionally, the *F*-test yields a significance value of 0.000, which is less than the specified significance level of 0.05 ($0.000 < 0.05$) with an *F*-value of 36.690. Therefore, it can be concluded that both the Internal Control System and Regional Financial Supervision significantly impact the Reliability of Financial Report Presentation, both individually and simultaneously.

Keywords: Internal Control System, Regional Financial Supervision, Reliability of Financial Report Presentation.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dengan bentuk hubungan kausal serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sikka. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan pada setiap SKPD, total responden 72 orang, dimana analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial nilai Sig. dari X1 adalah 0,004 kurang dari taraf signifikansi 0,05 ($0,004 < 0,05$) dengan *t* hitung 2.989; nilai Sig. dari X2 adalah 0,000 kurang dari taraf signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan *t* hitung 4.365; dan secara simultan nilai Sig. dari uji *F* adalah 0,000 kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan *F* hitung sebesar 36.690. Sehingga disimpulkan bahwa secara parsial maupun secara simultan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Keuangan Daerah, Keandalan Penyajian Laporan Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia, telah membawa banyak perubahan seperti pada bidang sosial, politik, kemasyarakatan, ekonomi dan tatanan pengelolaan pemerintahan yang menarik perhatian masyarakat. Hal tersebut membuat semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), terkait pengelolaan keuangan baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Struktur pemerintah yang terdiri dari Pemerintah pusat maupun daerah ini merupakan pihak yang diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terdorong untuk menerapkan sistem kinerja yang bertanggungjawab atau bersifat akuntabel yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas publik merupakan suatu

bentuk kewajiban dalam pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak serta kewenangan (Mardiasmo, 2009:20). Bentuk penyampaian pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah pusat maupun daerah yaitu berupa laporan keuangan yang pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi dan digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan seluruh informasi dimana memuat data berbagai elemen, struktur, kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu, dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik kualitatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Salah satu faktor keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda) adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Selain itu, untuk menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai informasi, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuaskial, 2007). Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi dan efektivitas pengawasan keuangan dapat menjadi tantangan. Untuk dapat menjawab tantangan ini, beralih ke opini auditor yang merupakan sebuah penguji profesional yang memberikan pernyataan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan. Untuk LKPD Kabupaten Sikka sendiri telah 5 tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Sikka TA 2018-2022

Entitas Pemerintah Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Pemerintah Kabupaten Sikka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: www.bpk.go.id

Namun masih terdapat beberapa catatan temuan BPK yaitu pada Tahun Anggaran 2020: Penatausahaan persediaan sarana pungutan pada Badan Pendapatan Daerah tidak tertib, penatausahaan dan pengelolaan BTT pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika tidak tertib, dan tidak tertibnya pengajuan perubahan Anggaran Belanja Dana Bos pada Dinas PKO. Tahun Anggaran 2021: Adanya sejumlah pelanggaran administratif mulai dari hierarki yang diizinkan dan pengelolaan keuangan yang tidak teratur, salah satunya yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan NTT adalah pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun 2021 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sikka dengan nilai temuan mencapai Rp.988.765.648. (lenterapos.id). Dan pada Tahun Anggaran 2022: "Pada pelaksanaan APBD, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, masih terdapat catatan temuan terkait penyusunan laporan keuangan, pendapatan, belanja dan aset," terang Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo (Tribunflores.com).

Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan pengawasan keuangan daerah. Pengendalian internal yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.

Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sikka perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi, melakukan pembenahan dan perbaikan atas sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kecurangan, ketidakakuratan laporan keuangan, penyalahgunaan anggaran, dan kerugian negara.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Komitmen Manajemen Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi pada SKPD Kab. Bengkalis), yaitu bahwa jika sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah semakin baik maka penyajian laporan keuangan akan semakin andal dan baik pula. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

Daerah Pada OPD di Provinsi DIY, menyatakan bahwa Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini dikarenakan pengawasan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DIY sudah sangat baik. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Suparwati (2019) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada OPD Kab. Temanggung) mengatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, temuan atau masalah, dan beberapa perbedaan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengidentifikasi “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka”, mengingat pengendalian internal dan pengawasan keuangan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. TINJAUAN TEORI

Agency Theory

Menurut Supriyono (2018) Konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Berdasarkan teori agensi dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Berdasarkan *agency theory*, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah yang efektif dapat meningkatkan keandalan penyajian laporan keuangan.

Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia (SAP) berbasis akuntansi akrual antara lain sebagai berikut: Laporan Anggaran: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya". Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Keandalan

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Nilai informasi yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut: penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut UU No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat lima unsur dari pengendalian internal pemerintahan yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian.

Pengawasan Keuangan Daerah

PP No. 60 Tahun 2008 (Pasal 1 Ayat 3) menyatakan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan

peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut Handoko (2014:359) yang meliputi dimensi dan indikator sebagai berikut: Prosedur, Standar, Ketelitian, Pengukuran Pekerjaan, dan perbaikan.

3. HIPOTESIS

Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dengan demikian pengajuan hipotesis yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

Sistem pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163). Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan/ ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyanti, 2004 dalam Putra 2017).

H1: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

2) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Pengawasan Keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan, supaya menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan dapat diandalkan, serta sesuai dengan konsep yang telah ditentukan pasti diperlukan pengawasan keuangan daerah yang maksimal terutama dalam proses pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyajian laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif pokok yaitu keandalan.

H2: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

3) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

Iskharimah,dkk (2021) pada penelitiannya mengatakan bahwa Pengendalian internal berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan yang artinya bahwa apabila pengendalian

internal semakin efektif maka secara tidak langsung tingkat keandalan pada sebuah laporan keuangan Kemudian untuk pengawasan Keuangan juga berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan sehingga dapat dijelaskan bahwa semakin sering diadakan Pengawasan Keuangan maka semakin mengurangi tingkat keandalan laporan keuangan

H3: Sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dengan bentuk hubungan kausal dan serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:11) pendekatan asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal berarti hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih untuk menjelaskan pengaruh perubahan yang nantinya berguna untuk menganalisa hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Maksud dari penelitian ini ialah penulis mengadakan studi kausal agar mampu mengatakan bahwa: Variabel X mempengaruhi variabel Y. Rancangan atau *design* Penelitian ini, digunakan penulis untuk memberikan bukti secara langsung dan menganalisis Pengaruh sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pegawai bagian keuangan/akuntansi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sikka berjumlah 72 orang dari 72 SKPD yang terdiri dari 1 Sekretariat Dewan, 1 Inspektorat, 7 Badan, 4 Kantor, 13 Dinas dan 12 Bagian, 21 Kecamatan dan 13 Kelurahan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *sampling jenuh*, yang dimana seluruh populasi atau elemen populasi yang ada dijadikan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah populasi yaitu 72 orang yang diambil dari 72 SKPD di Kabupaten Sikka.

5. HASIL PENELITIAN

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a	
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error
1	(Constant)	.623	3.041
	Sistem Pengendalian Internal	.251	.084
	Pengawasan Keuangan Daerah	.390	.089

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi linear pada penelitian ini adalah:

$$Y = 0.623 + 0.251 X1 + 0.390 X2$$

Penjelasan atas persamaan regresi adalah sebagai berikut:

1) Intercept (Constant): 0.623

Nilai ini menunjukkan bahwa jika nilai Sistem Pengendalian Internal (X1) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X2) adalah 0, maka nilai keandalan penyajian laporan keuangan (Y) adalah 0.623.

2) Sistem Pengendalian Internal (X1): 0.251

Koefisien 0.251 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Sistem Pengendalian Internal akan meningkatkan keandalan penyajian laporan keuangan sebesar 0.251 unit, dengan asumsi variabel lain konstan.

3) Pengawasan Keuangan Daerah (X2): 0.390

Koefisien 0.390 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Pengawasan Keuangan Daerah akan meningkatkan keandalan penyajian laporan keuangan sebesar 0.390 unit, dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hipotesis

1) Uji t (Uji Statistik Parsial)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan independen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2013:98). Dengan tingkat signifikan 5% dari $df = n - K - 1$ diperoleh nilai t_{tabel} dibandingkan dengan nilai t_{hitung} yang diperoleh. Dengan membandingkan kedua nilai t tersebut, maka akan diketahui pengaruhnya, yaitu dapat diterima atau ditolaknya hipotesis.

**Tabel 2. Uji t
Coefficients^a**

Model	t	Sig.
1 (Constant)	.205	.838
Sistem Pengendalian Internal	2.989	.004
Pengawasan Keuangan Daerah	4.365	.000

a. Dependent Variable: Keandalan Penyajian Laporan Keuangan

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas maka, dapat dijelaskan hasil uji t sebagai berikut:

- a. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

Diketahui bahwa Nilai t-hitung sebesar 2.989 dengan p-value (Sig) = 0.004. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa p-value (Sig.) $0.004 < 0.05$, maka H_a di terima. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

- b. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

Diketahui bahwa Nilai t-hitung sebesar 4.365 dengan p-value (Sig.) = 0.000. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa p-value (Sig.) $0.000 < 0.05$, maka H_a di terima. Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

2) Uji F (Uji Statistik Simultan)

Menurut Ghozali (2013:98) Uji F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan yang digunakan adalah 5%, distribusi F dengan derajat kebebasan ($a:K-1, n-K-1$).

Tabel 3. Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	298.643	2	149.322	36.690	.000 ^b
	Residual	223.839	55	4.070		
	Total	522.483	57			

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas maka, dapat dijelaskan hasil uji F sebagai berikut:

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan: Diketahui bahwa Nilai F-hitung adalah 36.690, dengan nilai signifikansi (p-value) adalah 0.000. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa p-value (Sig.) $0.000 < 0.05$, maka H_a di terima. Hal ini menunjukkan bahwa, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

5. PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap keandalan penyajian laporan keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan. Artinya jika semakin baik sistem pengendalian internal pada sebuah instansi atau organisasi maka laporan keuangan yang disajikan akan baik pula dalam hal ini keandalan dari laporan keuangannya. Sistem pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163). Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan/ ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyanti, 2004 dalam Putra 2017)..

Menurut teori agensi, terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan informasi dan motivasi antara kedua belah pihak. Prinsipal (masyarakat) tidak memiliki informasi yang lengkap tentang tindakan agen (pemerintah), sedangkan agen memiliki motivasi untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut, agen dapat menerapkan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan. Artinya dengan adanya pengawasan yang baik terhadap seluruh proses akuntansi yang terjadi dalam sebuah instansi atau organisasi maka bentuk pertanggungjawaban yang dihasilkan akan baik pula dalam hal ini laporan keuangan akan andal dan berkualitas secara keseluruhan. Hal ini juga diungkapkan oleh Arens dalam Amin (2019:161) yang menyebutkan dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi di dalam entitas akuntansi, maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas.

Pengawasan keuangan merupakan mekanisme pengendalian yang bersifat eksternal dari sebuah instansi/lembaga. Pengawasan keuangan sangat penting pada proses pelaporan keuangan sehingga adanya pimpinan melakukan peninjauan langsung dengan tujuan mengurangi resiko kelalaian dalam pencatatan laporan keuangan dan dapat dikatakan benar-benar valid, efektif serta

efisien dalam keandalan laporan keuangan (Iskharimah, dkk 2021). Pengawasan Keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan, supaya menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan dapat diandalkan, serta sesuai dengan konsep yang telah ditentukan pasti diperlukan pengawasan keuangan daerah yang maksimal terutama dalam proses pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyajian laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif pokok yaitu keandalan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis awal di terima, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Sikka telah berjalan dengan baik dan meningkatkan keandalan penyajian laporan keuangan daerah. Hal ini menggambarkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah berjalan secara optimal dan efektif dalam menjaga kualitas informasi keuangan, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan keandalan pelaporan keuangan daerah.

Menurut peneliti, berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan, menunjukkan pentingnya penerapan sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah yang kuat dan efektif. Hal ini dapat dicapai melalui pemeliharaan lingkungan pengendalian, kemampuan memberi penilaian atas setiap resiko yang akan dihadapi oleh setiap entitas, kegiatan pengendalian yang berguna memastikan arah sesuai tujuan entitas atau organisasi, informasi dan komunikasi yang diselenggarakan dengan baik, dan pemantauan yang dilakukan agar dapat menilai setiap informasi kinerja yang diperoleh. Serta untuk kegiatan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan standar, prosedur, ketelitian, pengukuran pekerjaan, dan perbaikan pada setiap entitas. Dengan adanya penerapan indikator-indikator tersebut diatas dengan baik maka akan terciptanya laporan keuangan yang andal dan berkualitas.

Sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah dapat dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang digunakan oleh *principal* untuk memonitor dan mengawasi *agent*. Sistem pengendalian internal dapat dipandang sebagai mekanisme pengendalian internal yang bersifat internal, sedangkan pengawasan keuangan daerah dapat dipandang sebagai mekanisme pengendalian internal yang bersifat eksternal. Berdasarkan *agency theory*, sistem pengendalian

internal dan pengawasan keuangan daerah yang efektif dapat meningkatkan keandalan penyajian laporan keuangan. Hal ini karena sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah dapat membantu untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

6. KESIMPILAN

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa : (1) Presentase skor total untuk variabel Sistem Pengendalian Internal 83.66% dengan keterangan kinerja baik, (2) Presentase skor total untuk variabel Pengawasan Keuangan Daerah 87.55% dengan keterangan kinerja sangat baik, dan (3) Presentase skor total untuk variabel Keandalan Penyajian Laporan Keuangan 88.28% dengan keterangan kinerja sangat baik.

Hasil statistik uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama(simultan) dua variabel bebas yaitu Sistem Pengendalian Internal(X1) dan Pengawasan Keuangan Daerah(X2) dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat Keandalan Penyajian Laporan Keuangan(Y), artinya semakin efektif penyelenggaraan pengendalian internal dan pengawasan terhadap keuangan daerah maka laporan keuangan yang disajikan pun dapat lebih berkualitas dalam hal ini andal, serta dapat menghindari kecurangan atau pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Hasil uji statistic uji t menunjukan secara parsial:

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa p-value (Sig.) $0.004 < 0.05$, maka H_0 di terima. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.
2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa p-value (Sig.) $0.000 < 0.05$, maka H_0 di terima. Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

Hasil analisis determinasi menunjukkan bahwa 55.6% variasi dalam keandalan penyajian laporan keuangan dijelaskan oleh variabel Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Daerah, sedangkan 44.4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain.

7. SARAN

1) Bagi Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sikka

Diharapkan agar dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja berkaitan dengan penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan yang disajikan semakin andal dan berkualitas untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Agar dapat menambah subjektivitas dalam hal ini responden untuk menghindari jawaban yang bersifat sepihak. Serta dapat mengembangkan variabel penelitian tidak hanya pada variabel dependen dan independen, tapi juga dapat menambahkan variabel pemoderasi atau intervening berupa ketepatan waktu serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap keandalan dan secara keseluruhan kualitas penyajian laporan keuangan.

8. KETERBATASAN

- 1) Subjektivitas penelitian yang digunakan kurang luas sehingga tidak menutup kemungkinan responden mengisi jawaban berdasarkan pendapat pribadi (sepihak)
- 2) Penelitian ini belum mengkaji variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi keandalan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.

REFERENSI

- Admin. (2022, September 22). WTP Kabupaten Sikka TA 2021 di ujung tanduk? Selestinus: Bisa dianulir! *Lenterapos.id*. <https://lenterapos.id/wtp-kabupaten-sikka-ta-2021-di-ujung-tanduk-selestinus-bisa-dianulir/>
- Anjani, I. A. P., Suriani, K., Widyasih, S., Mahayoni, K., Utama, G. B., & Putra, I. G. A. Y. D. (2019). Pengaruh pengawasan keuangan pada daerah-daerah di Indonesia terhadap tingkat korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 33–41. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19859>
- Darius, Y., Ranga, P., Philipus, A., Gheta, K., & Wellem, I. (2020). Kualitas pelayanan publik ditinjau dari aspek reformasi birokrasi (studi kasus pada kantor dinas pendapatan daerah Kabupaten Sikka). *Pengadaan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2), 190-201.
- Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosir, M. S. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2), 51-70.
- Dewi, K. S., Cipta, W., Bagia, I. W., Teknis, L., & Pamong, P. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). *Jurnal Manajemen Indonesia*, 7(3), 191-200.

- Dilliana, S. M., & Henrikus, H. (2022). *EBook-Manajemen keuangan daerah*. <https://repository.nusanipa.ac.id/id/eprint/165/1/22-06-41-EBOOK-MANAJEMEN%20KEUANGAN%20DAERAH%20rev-1.pdf>
- Dolorosa, M. A., Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(1), 60-78.
- Gapa, M. D., Herdi, H., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh faktor berperilaku organisasi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 304-319.
- Goo, E. E. K. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka. *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 393-408.
- Goo, E. E. K., & Lamawitak, P. L. (2021). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 98-110.
- Hafizha, S. N. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karimun (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Imran, M. (2020). Influence of human resources, information technology, internal control system, and regional financial supervision on value of financial reporting information. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(1), 49–65. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v2i1.1218>
- Iskharimah, Harmono, H., & Sihwahjoeni, S. (2021). Pengaruh tingkat kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern, dan pengawasan keuangan terhadap keandalan pelaporan keuangan kepolisian resort provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Trisakti (E-journal)*, 8(2), 287–308. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9844>
- KEPPRES No. 74 Tahun 2001. (n.d.). *Database peraturan / JDIH BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57264/keppres-no-74-tahun-2001>
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2020. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <http://www.bpk.go.id/> (diakses pada 2 Oktober 2023)
- Manossoh, H. (2015). Implementasi sistem akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan good governance pada pemerintah provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Nian tana Sikka. (n.d.). <https://sikkakab.go.id/pemerintahan>
- Nihayah, A., & Trisnawati, R. (2015). Pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal terhadap ketepatanwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada DPPKAD eks karesidenan Pati) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Nona Trisna, M., Herdi, H., & Jaeng, Y. (2023). Analisis sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal*, 1(4), 188–198. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i4.874>
- Novita, Dince, M. N., & Sanga, K. P. (2023). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa pada tingkat kecamatan Palue. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(5), 294–315.
- Nur, A. I. (2017). Pengaruh pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Patiro, K., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. (2021). Analisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(1), 117-135.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2018 tentang unit pelaksana teknis pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah, Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 No.26.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sikka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Jakarta: Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.
- Permendagri No. 77 Tahun 2020. (n.d.). *Database peraturan / JDIH BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- PP No. 60 Tahun 2008. (n.d.). *Database peraturan / JDIH BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- PP No. 71 Tahun 2010. (n.d.). *Database peraturan / JDIH BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Putra, R. A. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah, dan komitmen manajemen terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, IV, 1040-1044.
- Putri, A. K. (2021). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah pada OPD di Provinsi DIY (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Ruda, E. E., Mitan, W., & Rangga, Y. D. P. (2023). Pengaruh inventarisasi aset, penilaian aset, dan legal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi (JRIME)*, 1(4), 145-166.
- SemiColonWeb. (n.d.). EPPID | BPK-RI. <https://e-ppid.bpk.go.id/>

Suparwati, A. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi empiris pada OPD Kab Temanggung).

Tribunflores.com. (2023, July 26). Raih WTP, BPK catat adanya temuan Bupati Sikka: Mari kita selesaikan 60 hari ke depan. <https://flores.tribunnews.com/2023/07/26/raih-wtp-bpk-catat-adanya-temuan-bupati-sikka-mari-kita-selesaikan-60-hari-kedepan>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. <https://sikkakab.go.id/pemerintahan>

Yanto, Y. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kehandalan nilai informasi keuangan pemerintah daerah. *Econos Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 10(1), 74-82.

Yuliani, N. L., Susanto, B., & Farida, F. (2016). Analisis determinasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Jurnal Audit, Keuangan, dan Akuntansi Forensik*, 04(2), 145-160.